

Implikasi Coronavirus dan Upaya Pemulihan Ekonomi pada Sektor Industri Pariwisata

Sa'adah

Widyatama University Bandung

Email: saadah.5507@widyatama.ac.id

Khairul Shaleh

Widyatama University Bandung

Khairul.shaleh@widyatama.ac.id

Dini Arwaty

Widyatama University Bandung

dini.arwaty@widyatama.ac.id

Fitri Sukmawati

Widyatama University Bandung

fitri.sukmawati@widyatama.ac.id

R. Ferry Mulyawan

Widyatama University Bandung

ferry.mulyawan@widyatama.ac

Daniel Nababan

Widyatama University Bandung

daniel.nababan@widyatama.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan nasional Indonesia yang paling signifikan setelah sektor migas. Sejak *coronavirus* melanda dunia termasuk Indonesia, sektor pariwisata mendapat tekanan ekonomi cukup besar dan kontribusi pendapatan kepada negara dari sektor ini mengalami keterburukan. Memasuki *new normal*, pemerintah berupaya menghidupkan kembali industri sektor pariwisata agar dapat menjadi salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe interpretif. Penelitian interpretatif bertujuan untuk memahami realitas sosial yang dalam konteks ini memahami implikasi pandemi terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder sirkulasi yang peneliti peroleh melalui sirkulasi internet pada website resmi. Data sekunder menjadi material analisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian pariwisata dan industri kreatif melakukan upaya pemulihan kegiatan sektor pariwisata melalui penerapan kebijakan setelah sektor ini terhenti karena pandemik coronavirus. Upaya pemerintah melakukan pemulihan berharap dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja pada sektor pariwisata.

Kata Kunci

Industri pariwisata, kebijakan pemerintah, pemulihan ekonomi *coronavirus*.

I. PENDAHULUAN

Peran sektor pariwisata nasional semakin penting dilihat dari perkembangan dan kontribusi yang dilakukan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pembangunan daerah, serta dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Indonesia (Yakup, 2019). Sektor pariwisata mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui beberapa faktor (Zech et al, 2020). Pertama, sektor pariwisata merupakan penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam produksi. Kedua, pengembangan pariwisata mendorong pembangunan infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sektor ekonomi lainnya. Keempat, pariwisata berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan.

Kelima, Di industri pariwisata Indonesia, virus ini mulai berdampak pada awal tahun 2020 ketika banyak wisatawan yang membatalkan rencana perjalanannya, terutama wisatawan asing yang berasal dari China, negara asal virus ini (Sigala, 2020). Bagi pelaku pariwisata, situasi ini bermasalah, sehingga hampir 90% karyawan kehilangan pekerjaan (Cahyadi & Newsome, 2021; Zhu et al., 2022). Keputusan tersebut bertentangan dengan aspek kemanusiaan, namun harus juga dipahami karena melihat realitas dunia yang terjadi saat ini. Pemulihannya juga memakan waktu yang cukup lama, jika dilihat dari perekonomian Indonesia secara global, serta perekonomian pariwisata menjadi minus dan banyaknya tenaga kerja yang bekerja (Utami et al., 2021).

Dikeluarkan dari perusahaan tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, namun diperlukan strategi yang tepat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengupayakan sektor pariwisata pulih dan berjalan normal kembali (Khalid et al., 2021). Para pelaku pariwisata di Indonesia harus optimis bahwa situasi ini akan segera berakhir. Agen perjalanan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak langsung dari situasi pandemi. Beberapa jadwal perjalanan terpaksa harus mengalami pembatalan akibat pandemi yang melanda dunia. Beberapa negara menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan domestik dan internasional dengan menutup bandara dan larangan terbang bagi perusahaan selama pandemi. Persentase pembatalan perjalanan hampir 100%, sehingga banyak agen perjalanan menderita kerugian ekonomi. Situasi ini membuat beberapa agen perjalanan terpaksa berhenti beroperasi, dan hampir semua karyawan berhenti bekerja.

Seiring dengan penurunan jumlah wisatawan dan hampir nihil, hal ini juga berimbas pada okupansi kamar hotel. Hotel merupakan sektor yang paling terpukul akibat pandemi virus Covid-19, di mana banyak hotel mengandalkan pendapatan dari kerjasama dengan biro perjalanan (Purba et al., 2021). Tanpa adanya dukungan dari agen perjalanan, hotel tampak lumpuh dari aktivitas pemesanan, berkontribusi terhadap pendapatan hotel sebesar 60%. Saat ini banyak hotel telah memberhentikan hampir 99% karyawan mereka yang tidak dibayar dan menutup operasi hotel sepenuhnya untuk mengurangi lebih banyak kerugian. Lagi-lagi karena ketiadaan pendapatan, tingkat hunian hotel rendah dan tidak sepadan dengan pendapatan yang diterima. Selain kedua sektor tersebut, pelaku usaha restoran juga merasakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Sebagian besar restoran terpaksa tutup operasional karena tingkat kunjungan konsumen mengalami penurunan drastis sebagai bagian dari penutupan destinasi wisata di beberapa daerah. Akhirnya, tanpa dukungan agen perjalanan dan destinasi wisata, tak sedikit restoran yang berhenti beroperasi.

Pusat perdagangan souvenir juga merasakan dampak langsung dari pandemi. Penutupan tempat-tempat wisata di kawasan tersebut mengakibatkan banyak wisatawan yang meninggalkan

niat untuk berwisata, sehingga mengakibatkan pusat-pusat perdagangan souvenir kehilangan konsumen. Seperti yang kita ketahui bersama, wisatawan lokal saat ini berada di Indonesia dengan pembatasan perjalanan. Pusat oleh-oleh juga berperan bagi UMKM yang memasok barang-barang yang dijual oleh pusat oleh-oleh. Akibat ditutupnya pusat toko oleh-oleh tersebut, UMKM pun merasakan dampaknya dan menjadi loss factor yang sangat beruntun bagi UMKM dan beberapa vendor yang bekerjasama dengan pusat oleh-oleh tersebut.

Transportasi merupakan hal yang vital dalam pariwisata karena segala aktivitas dan perjalanan membutuhkan transportasi lintas wilayah dan negara. Perusahaan penerbangan, persewaan mobil, dan angkutan umum mana pun yang paling terkena dampak dari kejadian ini, mengingat banyak agen dan agen perjalanan yang membatalkan semua agenda perjalanannya untuk mengunjungi suatu destinasi wisata atau untuk berbagai keperluan lainnya. Situasi ini terjadi karena masyarakat dunia berusaha melindungi diri dari penularan virus Corona. Berkaca dari peristiwa yang terjadi, banyak pengusaha rental mobil dan biro perjalanan yang kesulitan membayar cicilan kendaraan yang masih berjalan hingga saat ini.

Untuk Indonesia, saat ini ada lima maskapai nasional yang mengoperasikan penerbangan reguler dan charter dari atau ke China, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Sebagai catatan, grup Garuda Indonesia setidaknya memiliki jadwal penerbangan hingga 40 penerbangan per minggu untuk China. Diperkirakan pendapatan sektor transportasi udara global pada tahun 2020 akan turun sebesar US\$252 miliar atau turun sebesar 44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Grafik menunjukkan penurunan pendapatan di sektor transportasi udara. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), jumlah kunjungan wisman pada Maret 2020 hanya 470.900. Angka tersebut mengalami penurunan minus 45,50 persen terhadap Februari 2020 dan penurunan 64,11 persen terhadap Maret 2019. Penurunan ini tentu langsung dirasakan oleh sektor transportasi penerbangan internasional. Garuda Indonesia dan Lion Air Group juga memiliki jadwal 44 penerbangan per minggu pada rute Indonesia-China. Secara agregat, rute Indonesia-China menyumbang 35-40 persen dari total penerbangan internasional Indonesia.

Dalam pengertian ini karyawan adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pariwisata, antara lain karyawan travel agent, karyawan hotel, karyawan restoran, pusat perdagangan souvenir, karyawan rental mobil, driver, tour leader (TL), dan tour guide (TG). Semuanya bergantung pada bisnis yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata. Di sektor pariwisata, ada 20 juta orang. Tenaga kerja di sektor pariwisata sebanyak 20 juta orang berdasarkan angka dari Kementerian Tenaga Kerja. Dari beberapa penjelasan di atas, tidak dapat dihindari bahwa berbagai kondisi akan muncul, meskipun ada berbagai harapan bahwa kondisi tersebut akan kembali normal.

Di industri pariwisata, hal ini terlihat dari penurunan kedatangan wisman yang signifikan, pembatalan tiket pesawat dan hotel, serta penurunan pemesanan. Situasi ini terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama bagi wisatawan. Masyarakat sudah merelakan niat bepergian untuk mengurangi risiko penyebaran dampak Covid-19 di kawasan wisata. Kondisi serupa juga terjadi pada pelaku usaha pariwisata dan perjalanan yang berdampak pada pelaku usaha UMKM, tenaga kerja informal, dan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan industri padat karya yang telah berhasil menyerap lebih dari tiga belas juta tenaga kerja. Jumlah ini memiliki dampak turunan atau multiplier effect bagi industri lain. Namun, sejak pandemi melanda dunia, termasuk Indonesia, sektor pariwisata dan industri pendukung kegiatan usaha pariwisata lainnya mengalami stagnasi. Riset ini mencoba melihat implikasi *coronavirus*

bagi industri pariwisata dan mengeksplorasi upaya pemerintah mengembalikan kegiatan industry pariwisata pada keadaan normal. Meskipun beberapa riset terdahulu telah menjelaskan hal serupa namun riset ini berfokus pada aspek regulasi dan program *recovery* sektor pariwisata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Terminologi pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu “Pari” yang berarti banyak atau berkali-kali, dan “tourism” yang berarti bepergian (Suwanto, 2021). Soekadijo (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan, sedangkan Wahab (2003) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan sementara dengan gaya hidup yang berbeda. Berbagai kegiatan pariwisata didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pengertian industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang saling berkaitan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain karena pariwisata dikatakan merupakan kombinasi fenomena dan hubungan timbal balik, yaitu interaksi dengan wisatawan, pelaku bisnis, pemerintah dan daerah tujuan wisata, serta masyarakat kawasan wisata. Sarana pariwisata, berdasarkan PP no. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, fasilitas dibagi menjadi (1) akomodasi; (2) restoran; (3) informasi dan layanan pariwisata; (4) pelayanan keimigrasian; (5) pusat informasi pariwisata (tourism information center); (6) kios e-wisata; (7) satgas kepolisian dan pariwisata; (8) toko suvenir; (9) petunjuk arah wisata; (10) lansekap.

Menurut Wirateja (2014), Aspek Ekonomi Usaha pengembangan pariwisata secara signifikan mempengaruhi berbagai sektor, dari skala kecil menengah hingga besar, dimana satu sektor saling mempengaruhi. Industri pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan usaha pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan menghambat migrasi penduduk ke perkotaan. Optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan kolaborasi kearifan budaya lokal dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang dapat mendukung kebangkitan ekonomi lokal. Pariwisata membuka peluang usaha khususnya di bidang kerajinan, hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya, yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sektor ekonomi masyarakat juga meningkat dalam pengembangan pariwisata. Membuka lebih banyak peluang usaha, membuka lapangan kerja yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat yang sejahtera, baik lokal, nasional, maupun global. Misalkan ini terkait dengan dampak sosial ekonomi tentunya. Dalam hal ini, kegiatan pariwisata ini akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama pada perubahan mata pencaharian, mengingat sektor pariwisata membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan bagi setiap individu. Menurut Sugihamretha (2020) Jika hal ini dikaitkan dengan dampak sosial ekonomi, kegiatan pariwisata akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama pada perubahan mata pencaharian, mengingat sektor pariwisata membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan dan pendapatan bagi setiap individu. Menurut Sugihamretha (2020), Jika ini dikaitkan dengan dampak sosial ekonomi, kegiatan pariwisata akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama pada perubahan mata pencaharian, mengingat sektor pariwisata membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan dan pendapatan bagi setiap individu.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe interpretif. Penelitian interpretatif bertujuan untuk memahami realitas sosial yang dalam konteks ini memahami implikasi pandemi terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui sirkulasi internet pada website resmi. Data sekunder yang telah berhasil diperoleh peneliti menjadi bahan dalam melakukan analisis

data. Selain menggunakan data sekunder, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi destinasi wisata. Peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan gambaran empiris tentang situasi yang dialami destinasi wisata sejak pandemi melanda dunia, sehingga memberikan implikasi ekonomi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pandemi COVID-19 Melemahkan Ekonomi Dunia

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menginfeksi hampir semua negara di dunia. Jumlah kasus positif meningkat secara eksponensial, dari puluhan pasien pada Januari 2020 menjadi lebih dari enam juta pada awal Juni 2020 (WHO, 2020). Setelah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, banyak negara melakukan penahanan penyakit melalui pembatasan perjalanan, kontak fisik, bahkan penguncian. Kebijakan restriktif menekan penyebaran virus tetapi memicu perlambatan tajam dalam ekonomi dunia. Australia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, China, dan Vietnam berhasil menekan penyebaran virus melalui kebijakan pembatasan aktivitas. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan gangguan pada rantai pasokan, mengurangi aktivitas produksi dan konsumsi, serta meningkatkan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang layak (Scheeweiss, Murtaugh, dan Bloomberg Economics, 2020). Kinerja ekonomi beberapa negara terkoreksi tajam pada Q1-20, sehingga tumbuh negatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi antara lain dialami China, kawasan Euro, Inggris, Jepang, Filipina, Thailand, dan Singapura hingga menyentuh rekor terendah sejak Global Financial Crisis (GFC). Hanya beberapa negara yang mampu menghindari pertumbuhan negatif meski mengalami koreksi tajam, seperti AS, India, Indonesia, Turki, dan Vietnam. 2020). Kinerja ekonomi beberapa negara terkoreksi tajam pada Q1-20, sehingga tumbuh negatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi antara lain dialami China, kawasan Euro, Inggris, Jepang, Filipina, Thailand, dan Singapura hingga menyentuh rekor terendah sejak Global Financial Crisis (GFC). Hanya beberapa negara yang mampu menghindari pertumbuhan negatif meski mengalami koreksi tajam, seperti AS, India, Indonesia, Turki, dan Vietnam. 2020). Kinerja ekonomi beberapa negara terkoreksi tajam pada Q1-20, sehingga tumbuh negatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi antara lain dialami China, kawasan Euro, Inggris, Jepang, Filipina, Thailand, dan Singapura hingga menyentuh rekor terendah sejak Global Financial Crisis (GFC). Hanya beberapa negara yang mampu menghindari pertumbuhan negatif meski mengalami koreksi tajam, seperti AS, India, Indonesia, Turki, dan Vietnam.

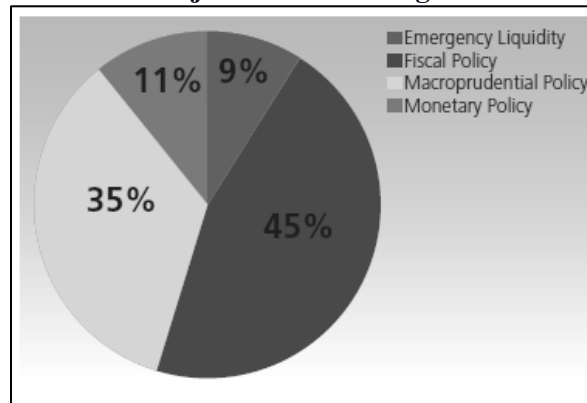
Langkah-langkah penahanan memberi tekanan pada sektor manufaktur dan jasa global. Sektor pariwisata paling terpukul, dengan proses pemulihan diprediksi sangat bertahap. Menurut UNWTO, sektor pariwisata internasional mengalami kontraksi 22% selama Q1-20 dan berpotensi turun 60%-80% sepanjang tahun 2020. Travel ban telah mengganggu industri penerbangan, perjalanan, dan perhotelan. International Aviation Association (IATA) memperkirakan potensi kerugian industri penerbangan hingga USD314 miliar pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Perusahaan penerbangan menunda perawatan pesawat, menunda/membatalkan rencana investasi, dan meminta karyawan keluar dari tanggungan mereka untuk melakukan pemecatan yang signifikan (KPMG, 2020).

4.2. Kebijakan Mengatasi Dampak COVID-19

Penurunan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19 telah mendorong langkah agresif otoritas dunia. Selain langkah-langkah kebijakan penguatan sektor kesehatan, otoritas juga memperhatikan upaya mengatasi dampak pelemahan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus (Suksmonohasi & Indira, 2019). Sasaran kebijakannya juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah daerah, dan menysar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan ASEAN juga menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi dampak pandemi. Respons kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan likuiditas darurat. Menurut Yale University, hingga April 2020, kebijakan fiskal paling banyak digunakan (45% dari total kebijakan),

diikuti oleh makroprudensial (35%), moneter (11%), dan likuiditas darurat (9%). Korea Selatan dan AS merupakan negara yang paling agresif mengeluarkan kebijakan fiskal dan makroprudensial. Nilai stimulus fiskal dalam menanggapi COVID-19 mencapai sekitar 3,7% dari PDB Dunia. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan KKG 2008/2009, yaitu sekitar 1,5% dari PDB. Nilai ini akan terus meningkat seiring dengan diluncurkannya beberapa stimulasi.

Gambar 1. Kebijakan Untuk Mengatasi Covid-19



Sumber: Masagung

Kebijakan fiskal untuk menghadapi COVID-19 memiliki karakteristik yang berbeda dengan saat KKG. Stimulus fiskal selama KKG 2008/2009 difokuskan pada investasi publik dan asuransi pengangguran. Sementara itu, selama krisis COVID-19, pemerintah memprioritaskan bantuan kepada sektor tenaga kerja dan rumah tangga melalui skema retensi pekerjaan, asuransi pengangguran, pembayaran tunai langsung, dan relaksasi pajak. Pemerintah juga membantu sektor kesehatan dan bisnis yang terkena dampak. Bahkan memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi warganya.

Tekanan di pasar keuangan dan perekonomian juga mendapat respon agresif dari otoritas moneter. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan berfungsinya pasar keuangan, dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah-langkah tersebut antara lain pemotongan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, pencegahan aliran modal, dan penetapan pengaturan swap.

Kebijakan penurunan suku bunga dilakukan cukup agresif pasca merebaknya COVID-19. Instrumen kebijakan lainnya juga mengiringi kebijakan penurunan suku bunga. Bank sentral melonggarkan GWM dan mengadopsi kebijakan yang tidak konvensional (*quantitative easing/QE*) dengan membeli surat berharga pemerintah dan swasta. Batas pembelian surat berharga dinaikkan, meski The Fed tidak membatasi jumlahnya (*unlimited*). Bank sentral juga mengeluarkan kebijakan untuk memastikan pasar keuangan tetap berjalan dengan melakukan transaksi di pasar uang dan memastikan likuiditas di sistem perbankan untuk kelancaran penyaluran kredit. Kondisi yang memburuk juga telah mendorong otoritas moneter beberapa negara untuk memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan besar, termasuk maskapai penerbangan dan pemerintah daerah.

4.3. Potensi Risiko Kebijakan Moneter dan Fiskal

Pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal diperkirakan mampu menahan pelemahan ekonomi lanjutan akibat COVID-19. Namun, stimulus kebijakan juga berpotensi menimbulkan risiko.

4.3.1. Risiko Kebijakan Fiskal

Peningkatan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah memperlebar defisit fiskal di tengah menurunnya penerimaan pemerintah. Pemerintah menutupi kebutuhan pembiayaan dengan menerbitkan surat berharga atau mencari pinjaman, sehingga mempertaruhkan keberlanjutan utang. Peningkatan beban fiskal terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Defisit fiskal AS tahun 2020 diperkirakan akan semakin melebar menjadi 17,9% PDB (dari 4,6% PDB pada 2019), Jerman (7% PDB dari 1,4% pada 2019), Singapura (15,4% PDB dari 0,3%), India (7,9% dari PDB PDB dari 4,6%), dan Indonesia (6,3% dari PDB dari 2,2%). Proses pemulihan keuangan ke posisi sebelum COVID-19 diperkirakan lebih lambat dari perkiraan.

4.3.2. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang akomodatif, selain memberikan manfaat, juga dapat menimbulkan risiko. Suku bunga rendah dapat memicu penarikan utang yang berlebihan oleh korporasi, sehingga meningkatkan risiko pelunasan utang. Risikonya bahkan lebih besar jika utang dalam mata uang asing dan ada kenaikan suku bunga. Suku bunga rendah juga tidak bisa meningkatkan investasi produktif karena permintaan masih rendah. Kondisi ini menciptakan decoupling antara pasar keuangan dan sektor riil dan berpotensi menimbulkan gelembung aset. Merujuk pada penelitian Anggarini (2021), terungkap beberapa fakta, yaitu:

1. Tersedianya dana APBN dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp298,5 miliar
2. Pemerintah telah memberikan insentif kepada agen perjalanan dan maskapai penerbangan, seperti promosi pariwisata, perjalanan keluarga, dan influencer.
3. Tersedianya potongan harga tiket domestik yang diberikan kepada wisatawan domestik rata-rata yaitu 51,44% untuk 25% kapasitas tempat duduk penerbangan sekali jalan, termasuk diskon 30% untuk kuota 25% kursi penerbangan ke 10 destinasi wisata . Efektif 2020. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan. Diskon ini untuk tujuan penerbangan domestik dengan tujuan wisata yaitu Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba Labuan Bajo, Belitung dan Malang.
4. Ada usulan insentif dari asosiasi bahwa ada sepuluh destinasi wisata untuk pajak hotel dan restoran, dan tarifnya nol.
5. Memberikan hibah kepada pemerintah daerah atas pengurangan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp. 3,3 triliun.
6. Ada Rp 147 miliar APBN untuk sektor pariwisata yang saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Rencananya akan dikonversi menjadi hibah ke daerah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata daerah.
7. Upaya mendorong pergerakan wisatawan domestik dengan mempromosikan pariwisata domestik.
8. Mempromosikan event-event musik dan olahraga yang sudah ada di tanah air, juga dilakukan upaya untuk menarik potensi MICE dan event internasional agar dapat diselenggarakan di Indonesia.

Selama pandemi melanda dunia, kerugian ekonomi banyak dialami oleh pelaku pada sektor pariwisata (Lapointe, 2020). Meski pandemi melanda, kegiatan operasional kawasan wisata tetap berjalan, seperti pemeliharaan fasilitas wisata, pembayaran biaya air dan listrik, serta santunan pegawai yang masih bekerja atau diberhentikan tetapi dikunjungi wisatawan. Biaya tetap daya tarik wisata terus membebani operasional usaha pariwisata meski tanpa penerimaan pendapatan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran bagi pelaku usaha pariwisata, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pengusaha yang mengalami kerugian besar memiliki beban untuk kembali melakukan kegiatan pariwisata (Permana, 2020).

Urgensi pemulihan pariwisata memerlukan perencanaan yang terstruktur dengan baik agar dalam proses pelaksanaan pemulihan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

(Chang et al., 2020; Higgins-Desbiolles et al., 2022). Dalam pemulihan pariwisata, pemerintah memainkan peran vital sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk merumuskan dan menentukan kebijakan rencana pemulihan pariwisata (Herdiana, 2020). Namun, berbagai pihak yang terlibat dalam pariwisata harus dilibatkan, mengingat keberhasilan pemulihan pariwisata merupakan kolaborasi multi-aktor yang menuntut kerjasama dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan (Kristiana et al., 2021).

Pemerintah merancang program dan kegiatan untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membangun keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang tampak pada tabel 1:

Tabel 1: Program dan Kegiatan Pemulihan Sektor Pariwisata

Indicators	Program	Activity
Memasok	Persiapan Destinasi Perjalanan	Dukungan CHSE (kebersihan, kesehatan, keselamatan, lingkungan, penguatan Sapta Pesona di tempat wisata, revitalisasi fasilitas di tempat wisata dan BIMTEK 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas), peningkatan fasilitas di destinasi: bioskop, bar, rumah kaca, dan creative hub
	Implementasi dan pemantauan protokol CHSE di area persiapan tujuan	Pedoman protokol kesehatan terdiri dari pedoman protokol kesehatan di tempat wisata, homestay/pondok wisata, hotel, pemandu MICE, event, restoran, wisata arung jeram, wisata golf dan menyelam, sertifikasi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan, dan ini namanya Indonesia Peduli (I do care)
	Inovasi untuk pelaku acara dalam fase tanggap darurat COVID-19: acara virtual dan hybrid	Konser di rumah (konser getaran yang baik dengan Jaga Indonesia), tur virtual, Konser Drive-in (mengkawatirkan pengalaman hidup baru)
	Meningkatkan kualitas SDM Paragraf	Pelatihan hybrid (online dan offline) dan paragraf sertifikasi SDM

	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kreatif	Parekrak digital talent, Paregraf untuk start-up, scene, capture, bedah desain kemasan kuliner Indonesia, selaras, dan kreatif dari rumah
	Membangun infrastruktur dari konektivitas kompetitif dengan negara lain	Meningkatkan akses pembiayaan di bidang developer kuliner, fashion, craft, application, game, film, animasi & video,
	Hibah pariwisata	Pariwisata khusus untuk usaha homestay & usaha pariwisata yang berlokasi di desa wisata, dan bantuan insentif pemerintah, tambahan modal kerja untuk meningkatkan usaha/kapasitas produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
Tuntutan	Membangun citra yang menciptakan rasa aman & nyaman serta menarik minat pasar	Menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama di Asia Pasifik. Pengembangan kapasitas melalui komunikasi & kampanye, kemitraan, pemimpin opini utama, dan streaming langsung, & misi penjualan, aset digital, pasar, pendampingan (pelatihan, konsultasi, pendampingan)
	Pemberian paket insentif/optimasi kegiatan MICE di destinasi wisata, insentif peningkatan daya beli produk lokal & perluasan konektivitas wisata, pengembangan produk wisata	Pengembangan kapasitas profesional industri MICE, kegiatan promosi MICE bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah & korporasi, fasilitas penawaran MICE internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia, dan pembuatan platform MICE. En.

Beberapa intervensi kebijakan pemerintah untuk meminimalisir dampak Covid-19 melalui sektor pariwisata:

1. Melindungi mata pencaharian para pekerja di bidang pariwisata. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan pekerja.
2. Dengan dukungan Fiskal, pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan dan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah kemerosotan di sektor pariwisata.
3. Tambahan likuiditas dan bantuan tunai terdampak wabah COVID-19 di sektor pariwisata.
4. Beberapa alternatif dana sosial untuk dampak COVID-19 bagi 12 juta pekerja di sektor industri pariwisata.
5. Aplikasi sistem informasi pariwisata berbasis android ini berisi kumpulan data industri pariwisata seperti data sumber daya manusia, jenis pelayanan, atraksi, dan fasilitas wisata yang tersebar di seluruh Indonesia.
6. Ada potongan harga untuk pesawat dan potongan harga sewa untuk toko dan agen cargo.
7. Adanya beasiswa dan pelatihan di Politeknik Pariwisata untuk memperpanjang batas waktu pembayaran pajak dan kewajiban.
8. Terdapat sumber pendanaan penanggulangan bencana di sektor pariwisata, skema pendanaan jangka pendek, skema kredit modal kerja untuk UMKM, sektor informal, dan pemotongan pajak penghasilan badan.
9. Lembaga mitigasi bencana di bidang pariwisata di tingkat pusat hingga daerah.
10. Buku pedoman standar tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah/bencana di sektor pariwisata.

V. KESIMPULAN

Kerugian ekonomi di sektor pariwisata terjadi selama pandemi. Meski pandemi melanda, kegiatan operasional kawasan wisata tetap berjalan, seperti pemeliharaan fasilitas wisata, pembayaran biaya air dan listrik, serta santunan pegawai yang masih bekerja atau diberhentikan tetapi dikunjungi wisatawan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran bagi pelaku usaha pariwisata. Urgensi pemulihan pariwisata memerlukan perencanaan yang terstruktur dengan baik agar dalam proses pelaksanaan pemulihan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemulihan pariwisata, pemerintah memainkan peran vital sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk merumuskan dan menentukan kebijakan rencana pemulihan pariwisata

Upaya pemulihan industri pariwisata yang terdampak COVID-19 di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga para pelaku usaha, karena mereka yang langsung mengelola berbagai jenis usaha pariwisata memiliki peran penting. Kontribusi pelaku usaha dalam pemulihan pariwisata akan menjadi salah satu indikator keberlangsungan bisnis pariwisata pasca wabah COVID-19.

REFERENSI

- Anggarini, D. T. (2021). UPAYA Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid - 19. *Pariwisata*, 8(1), 22–31.
- Cahyadi, H. S., & Newsome, D. (2021). The post COVID-19 tourism dilemma for geoparks in Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 9(2), 199–211. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.003>
- Chang, C. L., McAleer, M., & Ramos, V. (2020). A charter for sustainable tourism after COVID-19. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9), 10–13. <https://doi.org/10.3390/su12093671>
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung Pendahuluan. *Jurnal Master Pariwisata*,

2019(July), 1–30. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.v07.i01.p01>

- Higgins-Desbiolles, F., Bigby, B. C., & Doering, A. (2022). Socialising tourism after COVID-19: reclaiming tourism as a social force? *Journal of Tourism Futures*, 8(2), 208–219. <https://doi.org/10.1108/JTF-03-2021-0058>
- Khalid, U., Okafor, L. E., & Burzynska, K. (2021). Does the size of the tourism sector influence the economic policy response to the COVID-19 pandemic? In *Current Issues in Tourism* (Vol. 24, Issue 19, pp. 2801–2820). <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1874311>
- Kristiana, Y., Pramono, R., & Brian, R. (2021). Adaptation Strategy of Tourism Industry Stakeholders During the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 0213–0223. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0213>
- Lapointe, D. (2020). Reconnecting tourism after COVID-19: the paradox of alterity in tourism areas. In *Tourism Geographies* (Vol. 22, Issue 3, pp. 633–638). <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1762115>
- Purba, J. H. V., Fathiah, R., & Steven, S. (2021). the Impact of Covid-19 Pandemic on the Tourism Sector in Indonesia. *Riset*, 3(1), 389–401. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.82>
- Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research*, 117, 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015>
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan : Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata Respon Kebijakan : Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 191–206.
- Suksmonohasi, M., & Indira, D. (2019). Kebijakan penanganan pandemi covid-19. *Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional*, 89–112.
- Suwantoro, G. (2021). *Fundamentals of tourism*. Andi.
- Utami, S., Damanik, J., & Mutiarin, D. (2021). New Normal Policy : Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.277>
- Wirateja, anak agung bagus. (2014). Penanganan Dampak Perkembangan Pariwisata Dalam Aspek Lingkungan Fisik, Sosial, Ekonomi dan Budaya Bali (Suatu Tinjauan Pustaka). *FORUM MANAJEMEN*, 12(2), 70–73.
- Yakup, A. (2019). No TitleThe influence of the tourism sector on economic growth in Indonesia. *Airlangga University*, 51.
- Zech, Nicola; Rempel, David; Ayia-Koi, A. (2020). *TOURISM & HOSPITALITY*.
- Zhu, Z., Gao, X., & Chen, R. (2022). Impact of Covid-19 on Tourism Industry. *Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021)*, 203(102834). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.419>